

DAFTAR PUSTAKA

- Alal Maula, M. I., & Wibowo, P. (2022). Meneropong Determinan Opini Lkpd Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Bina Ekonomi*, 26(1), 23–37. <https://doi.org/10.26593/be.v26i1.5341.23-37>
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*.2022, 2(2), 1–6.
- Apriani, R., Yulsiati, H., & Aryani Antina, Y. (2024). Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit Pemerintahan. 5(1).
- BPK-RI. (2017). Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. 1–15.
- Fatimah, D., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. 3(1), 1–15.
- Fitriana, L., Apandi, R. N. N., & Widarsono, A. (2025). Pengaruh Aspek Finansial Dan Kinerja Non Finansial Terhadap Opini Audit Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Republik Indonesia. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 427–447. <https://doi.org/10.62335/hh99t112>
- Fuad, S. (2013). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>
- Ghozali, I. (2018). Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas. *Basicedu*, 6.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>

- Kartika, A. D., & Yohanes, S. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Stie Semarang*, 5(3), 93–111.
- Mayasari, R. (2022). Lemahnya Signifikansi Sistem Pengendalian Internal untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 113–122. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.011>
- Meinarsih, T., Suratman, A., & Hidayati, N. (2020). The Effect of Application of Accrual-Based Government Accounting Standards, Apparatus Quality, Public Accountability and Government Internal Control Systems on Quality of Financial Statements. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(8), 452–460. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20aug142>
- Mutiara, R., Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 33(1), 1–12.
- Pemerintah Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 105.
- Pemerintah Indonesia. (2006a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Pemerintah Indonesia. (2006b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>

- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Privinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 497–505. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.15851>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. *Pemerintahan Daerah*, 1–70. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001, 2003(1), 1–5.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Zitteliana*, 19(8), 159–170.
- Republik Indonesia. (2004a). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. *Jurnal Media Hukum*, 1964(1), 1–122.
- Republik Indonesia. (2004c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 1–3.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Riadi. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.
- Rumihin, R., Ahuluheluw, N., & Leiwakabessy, T. F. F. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan pada Kab/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2016-2018. *Journal of Cleaner Production*, 19(11), 1–13. [http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526\(11\)00143-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526(11)00143-0)

Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Dan Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 38–45. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.515>

Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan *Jurnal Nasional Akuntansi XVIII, September*.

Setyaningrum Ismi, L. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus OPD Kota Palu). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang- Undangan (Studi Pada BPK Perwakilan Provinsi Riau). *Accounting and Management Journal*, 7(1), 95–107.

Sousa. (2014). Penggunaan Variabel Dummy Untuk Meningkatkan Nilai Determinasi Faktor Eksternal Terhadap Durasi. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.24912/jmts.v1i2.2663>

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D* (Issue January).

Sutaryo, Naviantia, I. A., & Muhtar. (2020). Audit opinion on government financial report: Evidence from local governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129–144.

Syam, J., Azlina, N., & Rasuli, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tindak Lanjut Rekomendasi sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), 240–262.

Utary, A. R. (2014). *Audit Sektor Publik* ((1st ed.)).

Yusuf, M., & Gustiana, N. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pemerintah Pusat Dengan Rekomendasi Audit Sebagai Variabel Moderasi. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 56–64. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4147>